

Evaluasi Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten

Irma Gustiani¹

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Banten

6661210051@untirta.ac.id

Leo Agustino²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Banten

leoagustino@untirta.ac.id

ABSTRACT

The Indonesian government promotes economic acceleration through National Strategic Projects (PSN), with emphasis on infrastructure development and export competitiveness. The Tanjung Lesung Special Economic Zone (SEZ) in Pandeglang Regency, Banten Province, established in 2015, represents a tourism-based SEZ with strategic potential for sustainable economic development. This research evaluates the implementation of tourism SEZ policy using Leo Agustino's policy evaluation model, which assesses five dimensions: human resources, institutional capacity, infrastructure and technology, financial support, and regulatory framework. The study employs qualitative descriptive research. Several implementation problems exist, including discrepancies between planning and implementation, underutilized public facilities, investment realization of only 3.42% of the Rp 92.4 trillion target, and low employment absorption with only 4,403 workers from the target of 85,000. Despite significant progress in the tourism sector, policy implementation requires stronger inter-sectoral collaboration, community involvement, and consistent regulatory and infrastructural support to achieve sustainable regional development.

Keywords: Policy Evaluation, Special Economic Zone (SEZ), Tourism Development, Tanjung Lesung, Leo Agustino Model

LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) mendorong pembangunan ekonomi dengan fokus pada infrastruktur dan daya saing ekspor. Salah satu strateginya adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui UU No. 39 Tahun 2009. KEK bertujuan memanfaatkan keunggulan geoekonomi dan geostrategi untuk mendorong industri, ekspor-impor, dan investasi bernilai tinggi. Model ini mengadopsi praktik global yang telah terbukti sukses di berbagai negara, termasuk China. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bertujuan untuk menciptakan peluang peningkatan investasi dengan menyiapkan area yang memiliki keunggulan untuk mendukung kegiatan industri, ekspor-impor, serta aktivitas ekonomi bernilai tinggi. Dengan adanya KEK diharapkan dapat meningkatkan pendapatan devisa negara melalui perdagangan internasional, serta membuka lebih banyak kesempatan kerja, pariwisata, dan investasi. Tujuan utama pengembangan KEK adalah Mendorong pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Pembaguan, serta meningkatkan daya saing.

Sejauh ini, Pemerintah Indonesia telah menetapkan 20 (Dua Puluh) KEK. Banten adalah salah satu Provinsi yang masuk dalam Kawasan Ekonomi Khuss (KEK). Salah satu Pariwisata yang Strategis dan dapat dikembangkan yaitu Pariwisata Tanjung Lesung, yang masuk kedalam kawasan ekonomi Khusus kategori Pariwisata. Kawasan Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung telah diresmikan pengoperasiannya pada Tanggal 23 Febuari 2015. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sebagaimana dimaksud dalam PP NO. 26 Tahun 2012 memiliki luas 1.500 ha (Seribu Lima Ratus Hektar Area). Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 terdiri atas 1 (satu) zona, yaitu Zona Pariwisata.

Pengembangan infrastruktur KEK Tanjung Lesung dilaksanakan dalam tiga kategori utama. Pertama, infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, komunikasi digital, dan pengolahan limbah dibangun untuk menjamin kenyamanan wisatawan. Kedua, akses transportasi ditingkatkan melalui pembangunan bandara, jalan tol, dan jaringan jalan provinsi. Ketiga, fasilitas wisata terintegrasi dikembangkan mulai dari hotel berbintang hingga fasilitas konservasi alam untuk mendukung pariwisata berkelanjutan.

Sejak diresmikan, KEK Tanjung Lesung mengalami kemajuan, terutam dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kunjungan wisatawan, dan kontribusinya terhadap ekonomi lokal. Meski demikian, tantangan masih ada dalam promosi dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Potensi wisata alam, budaya, dan buatan yang saling melengkapi menjadikan Tanjung Lesung sebagai destinasi unggulan Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan.

Tabel 1 Kunjungan Tamu Wisata Ke Tanjung Lesung

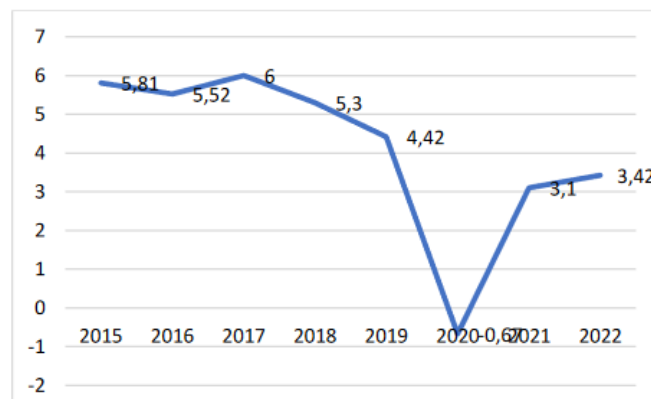
Bulan Kunjungan	Kunjungan Tahun 2022	Kunjungan Tahun 2023	Kunjungan Tahun 2024
Januari	68875	78271	72991
Febuari	75375	84235	81451
Maret	83527	99051	124210
April	87521	149798	195678
Mei	101513	162381	285229
Juni	121562	213638	453639
Juli	171538	325713	515,108
Agustus	195652	431243	629137
September	286654	575347	778735
Oktober	400262	710322	945584
November	451036	829233	1064832
Desember	539253	938122	1192586
Total	2.949.958	4.597.354	6.339.182

Sumber : PT Banten West Java 2025

Selama tiga tahun terakhir (2022–2024), jumlah kunjungan wisatawan ke Tanjung Lesung menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dari 2,9 juta pada 2022 menjadi lebih dari 6,3 juta pada 2024. Lonjakan ini mencerminkan keberhasilan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung yang didukung oleh peningkatan infrastruktur, fasilitas wisata, dan promosi destinasi. Bulan Desember selalu menjadi puncak kunjungan, dipengaruhi oleh libur akhir tahun, sementara bulan Januari menunjukkan angka terendah.

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan KEK yang mencakup pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing, analisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang menjadi yang harus diperhatikan. Data pertumbuhan Ekonomi dari tahun 2015 hingga 2022 memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika ekonomi daerah yang akan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan strategis pengembangan KEK.

Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pandeglang



Sumber: BPS Kabupaten Pandeglang, 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang menunjukkan variasi signifikan selama periode 2015-2022. Pada masa awal peresmian KEK Tanjung Lesung (2015), terjadi peningkatan aktivitas ekonomi akibat peningkatan kunjungan wisatawan. Namun, pertumbuhan mengalami kontraksi signifikan (-0,67%) pada 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Ekonomi mulai pulih pada 2021-2022, dengan capaian pertumbuhan 3,42% pada 2022

Dalam perjalanan pengembangannya, KEK Tanjung Lesung menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius. Tantangan utama pertama adalah kesenjangan antara perencanaan dan implementasi infrastruktur pendukung, yang diperparah oleh keterbatasan anggaran dan pembebasan lahan. Koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal juga menghambat percepatan pembangunan, seperti yang ditunjukkan pada table dibawah ini :

Tabel. 2 Infrastruktur Pendukung KEK

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten	Swasta
1. Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang; 2. Pelebaran Konstruksi Jalan Nasional Serang-Panimbang	1. Pembebasan Lahan untuk Pelebaran Jalan Nasional Serang-Panimbang; 2. Peningkatan Status Jalan Kabupaten Citereup-Tanjung Lesung Menjadi Jalan Provinsi;	1. Peningkatan dan Pelebaran untuk Pengalihan Jalur Jalan Kendaraan Umum pada jalur jalan yang melewati Belakang Pasar Panimbang sampai dengan belakang Kantor Kecamatan Panimbang.	1. Pembangunan Bandar Udara Baru Banten Selatan (Bandara Panimban).

Sumber: Bappeda Kabupaten Pandeglang 2024

KEK Tanjung Lesung masih menghadapi tantangan serius dalam pengembangan infrastrukturnya. Meski pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang berlangsung, dua proyek vital lainnya - Bandara Banten Selatan dan jalur kereta api - belum terwujud. Pembebasan lahan, keterbatasan anggaran, dan perubahan prioritas pemerintah menjadi hambatan utama. Dengan sebagian besar proyek masih tertunda, diperlukan percepatan dan sinergi yang lebih baik agar manfaat ekonomi dapat segera dirasakan masyarakat.

Masalah kedua muncul dalam pengelolaan fasilitas yang sudah dibangun. Pasar Batik Cikadu, yang seharusnya menjadi ikon pariwisata dan pusat ekonomi kreatif, telah tidak beroperasi sejak tahun 2020. Sentra IKM yang dibangun untuk mendukung UMKM lokal juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Ketidaksesuaian antara kapasitas fasilitas dengan kebutuhan pengguna menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan kawasan.

Dari sisi investasi, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara target dan realisasi. Dari target investasi sebesar Rp 92,4 triliun hingga tahun 2035, realisasi saat ini baru mencapai Rp 3,16 triliun atau hanya 3,45% dari target. Kendala akses menuju kesana dan ketidakpastian ekonomi menjadi faktor utama yang mempengaruhi minat investor.

Tantangan terakhir adalah penyerapan tenaga kerja yang masih jauh dari target. Dari target 85.000 tenaga kerja pada tahun 2025, saat ini baru tercapai 4.403 orang.

Kesenjangan antara kompetensi yang dihasilkan lembaga pendidikan dengan kebutuhan industri menjadi hambatan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan evaluasi dampak kebijakan pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Penelitian ini akan menganalisis kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan implementasinya di lapangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Tinjauan Pustaka

Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disingkat KEK, adalah area dengan batasan tertentu di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian serta mendapatkan fasilitas khusus. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dikembangkan untuk memanfaatkan keunggulan geoekonomi dan geostrategis, berfungsi sebagai lokasi bagi kegiatan industri, ekspor, impor, serta aktivitas ekonomi lainnya yang memiliki nilai tinggi dan daya saing global. Di dalam KEK, dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan untuk pekerja. Selain itu, setiap KEK juga menyediakan ruang bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi, baik sebagai pelaku usaha maupun pendukung kegiatan perusahaan yang ada di dalam kawasan tersebut

Kebijakan Publik

Secara etimologis istilah kebijakan publik terdiri dari dua suku kata yaitu kebijakan dan publik. Setiap kata memiliki pengertiannya masing-masing. Kata kebijakan atau *policy* diartikan dengan beberapa makna, diantaranya adalah pimpinan dan cara bertindak mengenai pemerintahan, kepandaian, kemahiran dan kebijaksanaan. Definisi singkat kebijakan publik salah satunya disampaikan oleh Thomas.R.Dye (2013) dalam Buku (Agustino, 2023) “..apa pun yang pemerintah pilih untuk lakukan ataupun tidak dilakukan

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah proses yang melibatkan penilaian terhadap kebijakan, mencakup substansi, implementasi, dan dampaknya (Anderson, 1975). Evaluasi kebijakan dianggap sebagai kegiatan yang fungsional, yang berarti tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga sepanjang seluruh proses kebijakan. Menurut (Agustino, 2023) Evaluasi Kebijakan adalah suatu upaya penilaian atas pelaksanaan suatu kebijakan, program, ataupun kegiatan, sekaligus untuk memahami faktor-faktor penghambat maupun pendorong dari keberhasilan ataupun ketidakberhasilan suatu kebijakan, program, ataupun kegiatan.

Dalam penelitian ini menggunakan Model Evakuasi Kebijakan Leo Agustino, terdiri dari lima dimensi utama yang saling terkait dalam menilai suatu kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut adalah: Sumber Daya Aparatur (SDA)/SDM yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan melalui empat indikator utama: kompetensi, kapabilitas, karakter, dan integritas; Kelembagaan yang menjadi faktor kunci pembangunan nasional dengan lima indikator: kepemimpinan, manajemen organisasi, koordinasi, komunikasi publik; Sarana, Prasarana, dan Teknologi yang merupakan elemen krusial dengan tiga indikator: ketersediaan, IoT, kualitas data; Finansial yang penting untuk optimalisasi kebijakan; dan Regulasi yang mencakup regulasi turunan dan harmonisasi kebijakan dengan fokus pada pemahaman dan implementasi regulasi.

METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berfokus pada pengumpulan data deskriptif yang berasal dari kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku yang diamati. Metode penelitian dalam studi kualitatif meliputi pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan interpretasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Steve dan Jennifer Thurlow menyatakan bahwa "Penelitian adalah proses pengumpulan dan penyajian informasi secara sistematis." Ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengumpulkan data dan menyajikan hasilnya dengan cara yang terstruktur (Sugiyono, 2018).

Dengan memilih pendekatan metodologi kualitatif dan deskriptif, penelitian berjudul "Evaluasi Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung " dilakukan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung . Penelitian ini akan mengedepankan aspek kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk mendalami Dampak kebijakan kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Lesung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengevaluasi Dampak kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung, penelitian ini menggunakan lima dimensi utama sebagaimana dikembangkan oleh Leo Agustino, yaitu: sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana serta teknologi, keuangan, dan regulasi. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap berbagai aspek yang saling berkaitan dalam proses implementasi kebijakan. Setiap dimensi merepresentasikan tantangan dan peluang yang muncul dalam konteks lokal, sekaligus mencerminkan efektivitas kebijakan dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut ini disajikan pembahasan hasil evaluasi berdasarkan masing-masing dimensi tersebut, dimulai dari sumber daya aparatur sebagai faktor kunci dalam menjalankan kebijakan di tingkat implementatif.

a. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur (SDA) merupakan faktor dalam keberhasilan kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. Berdasarkan empat indikator dari Agustino (2023) yaitu kompetensi, kapabilitas, karakter, dan integritas, terlihat sejumlah tantangan dan potensi. Dari sisi kompetensi, ditemukan adanya ketimpangan antara tenaga kerja profesional dari luar kawasan dengan masyarakat lokal. Warga setempat cenderung menempati posisi non-teknis akibat keterbatasan akses pelatihan, sementara program pelatihan dari pemerintah belum merata dan kurang menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Pada kapabilitas, kolaborasi antar-aktor telah dilakukan, namun masih terdapat kesenjangan antara rencana formal dan harapan masyarakat. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih partisipatif dan kontekstual dalam membangun kapasitas birokrasi dan masyarakat, terutama di wilayah yang rawan bencana seperti Tanjung Lesung. Dari segi karakter aparatur, beberapa instansi menunjukkan sikap responsif dan kolaboratif. Namun, minimnya keterlibatan langsung dengan masyarakat dan kurangnya keberpihakan menjadi kritik utama. Karakter aparatur perlu diarahkan pada empati sosial dan kemampuan mendekatkan kebijakan dengan kebutuhan warga. Terakhir, pada sub indikator integritas, meskipun ada transparansi dan akuntabilitas di tingkat lembaga, masyarakat masih merasakan ketimpangan manfaat ekonomi dan kurangnya dukungan langsung. Integritas harus diwujudkan tidak hanya secara administratif, tetapi juga melalui keterlibatan aktif dan berpihak pada keadilan sosial.

Evaluasi Dampak kebijakan KEK Tanjung Lesung indikator SDA

Evaluasi dampak kebijakan KEK Tanjung Lesung menunjukkan hasil yang beragam. PT Banten West Java berhasil membangun kompetensi internal melalui rekrutmen tenaga kerja sesuai standar industri pariwisata dan menjaga kapabilitas teknis dengan baik melalui program pelatihan internal. Namun, terdapat tantangan serius dari sisi masyarakat lokal yang menghadapi keterbatasan akses pekerjaan formal dan mobilitas sosial ekonomi yang terbatas. Selain itu, pemerintah sebagai regulator masih menghadapi kendala dalam kapasitas kelembagaan yang belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan integrasi kebijakan antarinstansi yang perlu ditingkatkan.

b. Kelembagaan

Kelembagaan menjadi aspek penting dalam mendukung efektivitas kebijakan pengembangan KEK Tanjung Lesung. Berdasarkan analisis terhadap empat sub-indikator kepemimpinan, manajemen organisasi, koordinasi dan kolaborasi, serta komunikasi publik, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Pada aspek kepemimpinan, peran pengambil keputusan masih didominasi oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis. Kepemimpinan lokal belum mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan arah pembangunan, yang menyebabkan rendahnya partisipasi warga dan pemanfaatan fasilitas publik. Dalam hal

manajemen organisasi, struktur kelembagaan telah terbentuk secara formal dengan pembagian peran yang jelas. Namun, pelaksanaan dan pengawasan belum optimal. Proyek infrastruktur yang belum termanfaatkan dan rendahnya keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa manajemen belum responsif terhadap kondisi lokal. Sementara itu, koordinasi dan kolaborasi antar aktor, baik dari pihak swasta, pemerintah daerah, maupun instansi pusat, masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya sinergis. Keterlibatan masyarakat masih minim, dan kolaborasi yang dibangun belum menyentuh kebutuhan dasar warga lokal secara berkelanjutan. Dari sisi komunikasi publik, ditemukan kurangnya interaksi efektif antara pengelola kawasan dan masyarakat. Ketidaksesuaian antara informasi kebijakan dan realita lapangan berdampak pada rendahnya pemahaman dan keterlibatan warga dalam pembangunan. Secara umum, kelembagaan dalam pengelolaan KEK Tanjung Lesung memerlukan penguatan, baik dari segi struktur, pendekatan, maupun relasi sosial. Transformasi kelembagaan ke arah yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Evaluasi Dampak Kebijakan KEK Tanjung Lesung Indikator Kelembagaan

KEK Tanjung Lesung menghadapi tantangan kepemimpinan yang kompleks dimana BWJ sebagai pengelola utama menunjukkan kepemimpinan adaptif namun lebih fokus pada bertahan institusional daripada membangun sinergi dengan aktor lokal, sementara pemerintah daerah dilemahkan oleh kebijakan sentralistis yang mengurangi otonomi mereka, sehingga masyarakat lokal menjadi pihak yang paling terdampak akibat ketiadaan pemimpin yang berkomitmen terhadap pemberdayaan warga; meskipun BWJ telah mencoba membangun kolaborasi dan infrastruktur seperti rumah susun pekerja dan sentra IKM, serta melakukan komunikasi publik terkait keamanan dan mitigasi bencana, namun pendekatan yang dijalankan masih bersifat sektoral dan belum sistemik, sehingga diperlukan perbaikan sistematis dalam aspek kepemimpinan, manajemen organisasi, koordinasi, dan komunikasi publik untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan KEK Tanjung Lesung.

c. Sarana, prasarana, dan teknologi

Evaluasi terhadap sarana, prasarana, dan teknologi menunjukkan bahwa pengembangan KEK Tanjung Lesung telah mengalami kemajuan, namun belum merata. Dari aspek ketersediaan infrastruktur, pembangunan fasilitas wisata dan akomodasi telah dilakukan, tetapi akses transportasi dari luar kawasan masih terbatas. Fasilitas pendukung di desa sekitar pun belum optimal, sehingga belum sepenuhnya mendorong keterlibatan masyarakat lokal. Pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) sudah dimulai, khususnya dalam sistem mitigasi bencana dan fasilitas hotel. Namun, teknologi ini belum dimanfaatkan secara luas, terutama untuk sektor UMKM, pengelolaan sampah, dan layanan publik. Kurangnya integrasi dan literasi teknologi menjadi kendala utama dalam mewujudkan kawasan yang modern dan efisien. Dari sisi kualitas data, masih ditemukan tantangan seperti pencatatan manual, data yang tidak diperbarui, dan lemahnya integrasi antar instansi. Hal ini berdampak pada ketidaktepatan kebijakan serta kurangnya

transparansi dalam pembangunan kawasan. Perlu adanya sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis digital agar kebijakan lebih tepat sasaran dan partisipatif

Evaluasi Dampak Kebijakan KEK Tanjung Lesung Indikator Sarana, prasarana, dan teknologi

Evaluasi dampak kebijakan KEK Tanjung Lesung menunjukkan kondisi yang kontras dalam tiga aspek utama pengembangannya. Di bidang sarana-prasarana, terjadi ketimpangan yang signifikan dimana fasilitas cenderung bersifat eksklusif dan kurang terintegrasi dengan masyarakat sekitar, ditambah dengan keterbatasan akses akibat jalan tol Serang-Panimbang yang belum selesai, meskipun terdapat pembangunan infrastruktur seperti Pasar Berbatik Cikadu yang sayangnya memiliki tingkat pemanfaatan rendah. Penerapan teknologi Internet of Things (IoT) masih sangat terbatas pada dua area spesifik yaitu mitigasi bencana dan otomatisasi hotel, dengan potensi besar yang belum dimanfaatkan untuk pengembangan UMKM lokal, sementara aplikasi "Go Pandeglang" yang dikembangkan pemerintah belum memberikan dampak signifikan dalam layanan publik. Masalah serius juga muncul dalam kualitas data, di mana sistem administratif tidak terintegrasi dengan baik, data UMKM dan tenaga kerja tidak diperbarui secara rutin, serta minimnya transparansi data yang menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan KEK secara keseluruhan.

d. Keuangan

Aspek keuangan menjadi tantangan utama dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung. Terbatasnya pendanaan, ketergantungan pada dana internal, serta infrastruktur yang belum memadai menghambat percepatan pembangunan. Akses jalan tol dan transportasi umum yang belum selesai juga menurunkan minat investor dan wisatawan. Meski ada kontribusi dari proyek seperti rusun dan Sentra IKM, sektor UMKM dan pariwisata belum berkembang maksimal akibat rendahnya promosi dan kunjungan. Untuk itu, diperlukan efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara inklusif dan berkelanjutan.

Evaluasi Dampak Kebijakan KEK Tanjung Lesung Indikator Keuangan

Evaluasi dampak keuangan KEK Tanjung Lesung mengungkapkan tantangan signifikan yang dihadapi oleh tiga pemangku kepentingan utama. PT BWJ sebagai pengelola menghadapi kendala pendanaan serius karena statusnya sebagai entitas swasta yang bergantung pada modal internal, berbeda dengan proyek BUMN yang mendapat dukungan anggaran negara substansial sejak KEK beroperasi tahun 2015. Pemerintah daerah mendapat pendapatan dari sewa aset seperti rumah susun dan Sentra IKM, namun alokasi anggaran pengembangan kawasan masih sangat terbatas, dengan realisasi investasi jauh dari target Rp65 triliun hingga 2035. Masyarakat lokal belum merasakan dampak finansial optimal meski mendapat bantuan pelatihan dan peralatan, dengan keterlibatan terbatas pada skema homestay dan belum bisa mengoptimalkan potensi

ekonomi lokal akibat rendahnya jumlah wisatawan dan pemanfaatan Sentra IKM yang belum maksimal.

e. Regulasi

Evaluasi terhadap kebijakan pengembangan KEK Tanjung Lesung menunjukkan bahwa aspek regulasi memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pandangan Leo Agustino (2020), regulasi diperlukan untuk menjadikan kebijakan lebih operasional melalui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. **Pertama**, dari sisi regulasi turunan, ditemukan bahwa meskipun regulasi strategis sudah tersedia, pelaksanaannya di lapangan belum optimal. Kesenjangan pemahaman, lemahnya sosialisasi, serta belum adanya pembaruan prosedural menyebabkan ketidakefisienan dalam pengelolaan aset, perizinan, dan perencanaan. Selain itu, regulasi belum sepenuhnya berdampak pada pelaku lokal seperti UMKM dan masyarakat sekitar kawasan. **Kedua**, terkait pemahaman regulasi, aktor kelembagaan strategis seperti PT BWJ dan DPMPSTSP telah memahami regulasi dengan baik. Namun, di tingkat pelaksana teknis dan masyarakat, pemahaman masih terbatas pada aspek administratif dan belum menyentuh tujuan substansial kebijakan. Minimnya sosialisasi dan lemahnya komunikasi partisipatif memperparah kondisi ini. **Ketiga**, dalam hal harmoni regulasi, masih terdapat disharmoni antara pusat dan daerah, antar-OPD, serta antar-sektor pembangunan. Ketidaksinkronan regulasi, perbedaan kapasitas lembaga, dan lemahnya koordinasi menunjukkan bahwa tata kelola KEK belum berjalan secara terintegrasi. Kurangnya pelibatan masyarakat juga memperlemah penerimaan dan manfaat kebijakan di tingkat lokal. Secara keseluruhan, regulasi dalam kebijakan KEK Tanjung Lesung belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan yang efektif dan inklusif. Dibutuhkan penguatan regulasi turunan, peningkatan pemahaman semua pemangku kepentingan, serta harmonisasi kebijakan antarinstansi dan sektor agar KEK benar-benar memberikan dampak pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Evaluasi Dampak Kebijakan KEK Tanjung Lesung Indikator Regulasi

Evaluasi dampak regulasi KEK Tanjung Lesung mengungkapkan ketimpangan pemahaman dan implementasi yang signifikan di tiga tingkat pemangku kepentingan. PT BWJ menunjukkan pemahaman kuat terhadap struktur regulasi teknis dan administratif, didukung oleh regulasi turunan seperti penetapan tol Panimbang dan bandara Banten Selatan sebagai Proyek Strategis Nasional. Namun, pemahaman ini masih terbatas pada aspek prosedural dan belum mencakup sepenuhnya dimensi pemberdayaan masyarakat lokal. Di tingkat pemerintah daerah, terjadi ketidaksinkronan antarinstansi dalam memahami posisi kelembagaan KEK, dengan keterbatasan kewenangan di kawasan inti dan komunikasi lintas OPD yang kurang efektif. Masyarakat lokal memiliki tingkat pemahaman regulasi yang relatif rendah, dengan kesenjangan signifikan antara potensi partisipasi formal melalui Pokdarwis dan UMKM dengan implementasi di lapangan yang masih lemah akibat sosialisasi yang tidak merata dan ketiadaan skema partisipasi yang jelas, sehingga masyarakat hanya menjadi penonton pasif dalam pembangunan kawasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan pertama dari aspek sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana-prasarana, keuangan, dan regulasi. Dari aspek **sumber daya aparatur**, ditemukan ketimpangan kompetensi antara tenaga kerja lokal dan non-lokal, serta keterbatasan akses pelatihan bagi masyarakat setempat. Kapabilitas dan karakter aparatur juga belum sepenuhnya berpihak pada pemberdayaan warga, dan integritas administratif belum cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kedua Dari sisi **kelembagaan**, struktur organisasi memang telah dibentuk secara formal, namun masih lemah dalam pelaksanaan, koordinasi, dan komunikasi publik. Kepemimpinan lokal belum mampu menjembatani kebutuhan masyarakat, sementara kolaborasi antar pemangku kepentingan cenderung sektoral dan belum menyentuh isu-isu dasar warga. Ketiga Aspek **sarana, prasarana, dan teknologi** menunjukkan adanya kemajuan pembangunan fisik, tetapi belum merata. Akses transportasi masih terbatas dan pemanfaatan teknologi belum optimal, terutama untuk mendukung UMKM dan pelayanan publik. Lemahnya integrasi data juga menghambat akurasi kebijakan. Keempat Dari aspek **keuangan**, keterbatasan pendanaan dan infrastruktur yang belum lengkap menjadi hambatan utama dalam menarik investor dan wisatawan. Minimnya promosi dan dukungan terhadap sektor UMKM juga menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi lokal. Kelima, aspek **regulasi** menunjukkan bahwa meskipun sudah tersedia regulasi strategis, pelaksanaannya di lapangan belum efektif. Kesenjangan pemahaman antar level pelaksana, kurangnya sosialisasi, serta disharmoni antara pusat dan daerah memperlemah implementasi kebijakan secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, keberhasilan pengembangan KEK Tanjung Lesung sangat bergantung pada pembenahan menyeluruh di kelima aspek tersebut. Dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan kolaboratif agar KEK benar-benar menjadi katalis pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat lokal.

REFERENSI

Buku

Agustino, L. (2023). Memahami Evaluasi Kebijakan Perspektif Teoretis dan Praktis. Empat Dua Media.

Creswell, John W. (2014). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.

Igirisa, Irawaty. (2022). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.

Jurnal

Darmastuti, S., jdep, A., & Kurniawan, A. (2024). Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pembangunan Ekonomi: Sebuah Studi Komparatif Indonesia dan Cina. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 63–72. <https://doi.org/10.33005/jdep.v1i2.415>

Sembiring, E. D., Sulistiawati, D., & Pertiwi, S. P. (2023). Optimalisasi Wisata Budaya Batik di Kampung Cikadu, Tanjung Lesung. *Batara Wisnu Journal : Indonesian Journal of Community Services*, 3(1), 10–25. <http://batarawisnu.gapenaspublisher.org/index.php/home/article/view/142>

Suryani, N. I., & Febriani, R. E. (2020). Kawasan Ekonomi Khusus Dan Pembangunan Ekonomi Regional: Sebuah Studi Literatur. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 1(2), 40–54. <https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v1i2.10902>

Yakup, A. P., & Haryanto, T. (2021). Pengaruh Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Bina Ekonomi*, 23(2), 39–47. <https://doi.org/10.26593/be.v23i2.3266.39-47>

Zulkarnaen, z., sayuti, m., & fajariah, f. (2022). Konsep Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Mandalika Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat Lokal. *Ganec Swara*, 16(1), 1362. <https://doi.org/10.35327/gara.v16i1.274>